



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 11 Mei 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H / 2020M. 2. Isu – Isu Aktual dan Solusinya
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, SPt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 30 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 3 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Agama Beserta Jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI secara virtual bersama Menteri Agama RI membahas **“Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dan Isu-isu Aktual,”** disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI akan melakukan Rapat Kerja secara khusus dengan Menteri Agama RI untuk membahas kebijakan diselenggarakan atau tidaknya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dan implikasi anggaran dari kebijakan yang akan diputuskan.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Menerapkan protokol Covid-19 secara ketat dalam setiap proses persiapan dan penyelenggaraan ibadah haji.
  - b. Apabila Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dibatalkan, dana pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BiPIH) yang telah dilakukan calon jemaah haji hendaknya dikelola oleh BPKH secara terpisah dan nilai manfaatnya dikembalikan kepada Calon Jemaah Haji yang berangkat tahun depan melalui rekening virtual dan dibayarkan sebelum pelunasan BiPIH tahun 1442 H/2021 M.
  - c. Jika penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M tetap diselenggarakan dengan pembatasan kuota, hendaknya calon jemaah yang berangkat bukan dari kategori risiko tinggi.
  - d. PPIU dan PIHK harus tetap dari kalangan muslim sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
  - e. Mempercepat proses pengisian jabatan Eselon I dan Eselon II untuk meningkatkan kinerja Kementerian Agama RI, baik di tingkat pusat maupun daerah.
  - f. Menyelesaikan masalah pembayaran Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen yang terhutang.
  - g. Mempertimbangkan kebijakan relaksasi pembatasan melakukan ibadah di Masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya, khususnya di daerah yang tidak termasuk zona merah, dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

- h. Mempertimbangkan kebijakan yang berkeadilan bagi semua umat beragama atau pihak lain yang distigma sebagai penyebab penyebaran Covid-19.
  - i. Mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan TVRI dalam kegiatan manasik haji melalui media elektronik.
  - j. Mencari solusi alternatif atas dicabutnya Surat Edaran dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI mengenai pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa PTKIN.
  - k. Bagi Calon Jemaah Haji yang berhak melunasi BiPIH Tahun 1441 H/2020 dan belum melunasi pada Tahap I karena kondisi Covid-19, maka akan diprioritaskan pada Pelunasan Tahap II.
  - l. Mengalokasikan anggaran untuk membantu guru ngaji dan ustadz akibat dampak wabah Covid-19.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang belum terjawab atau hal lain yang dianggap penting.

### **III. P E N U T U P**

Rapat ditutup pukul 14.16 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**H.YANDRI SUSANTO, SPt.**

